



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR **22** TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk memenuhi kebutuhan Regulasi di daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2018);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pekalongan Nomor 100.3.2/3796/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Perihal Usulan Propemperda Inisiatif Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
  2. Laporan hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 2023.
  3. Hasil Musyawarah dan Mufakat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan hari Senin Tanggal 8 Nopember 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan .
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Pengarusutamaan Gender.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2045 .
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi.

KEEMPAT :

Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah ini karena alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – undangan.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 8 Nopember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

  
*[Handwritten Signature]*  
HINDUN